

POTENSI DAN EKSISTENSI POLWAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS POLRI

(Ratnawati*)

Abstract

Policewoman is an integral element of Indonesian National Police. They have same function and duties with policemen and has a good potential to do every police duties. But, in fact, Policewoman doesn't have enough challenge to work in operational duties. Although there are some policewomen has been chief of police sector, even police resort, but there are no as chief of police district or chief of national police. Whereas International has give a big truth to women to be a president, prime minister, cabinet minister, etc. This fact is interested to be searched to know the reason why its happened with the explanatory studies, quantitative and qualitative element. Actually, Indonesian policewoman is the potential organs to improve the Indonesian National Police image, because they capable to works with the special woman behavior which important to succeed particularly in the people services, investigation in case women and children involved, patrol, traffic, and law awareness building people. Moreover, with their special attitude as woman, policewoman can lead the organization better and people wish policewoman very much to accomplish a task in the operational field.

Keywords: Potential, Existenstion Police Women, operational duties, improving image.

1. Pendahuluan

Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai kaum perempuannya. Pria-pria berhasil, seringkali berkat adanya perempuan-perempuan tangguh di belakangnya. Dengan adanya kesadaran, betapa pentingnya peran perempuan dalam mewujudkan budaya pelayanan yang lebih memanfaatkan kedekatan dengan masyarakat, sesuai pasal 1, butir 1 dan pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menempatkan posisi polisi wanita (polwan) pada posisi yang lebih berperan.

Menurut *Muradi Clark*¹, peran polwan dapat menjadi salah satu kunci bagi perbaikan citra Polri dan reformasi Polri yang tengah berlangsung, malahan mereka bisa menjadi faktor penentu hitam putihnya pencitraan Polri di masa mendatang. Namun dalam praktek operasionalnya, implementasi peran polwan di tubuh Polri justru belum seperti yang diharapkan.

Secara kuantitatif, jumlah Polwan RI baru mencapai 3,2 % dari seluruh anggota Polri, dan sebagai bahan perbandingan, jumlah polwan Denmark, Amerika, Inggris, dan Jepang, masing-masing adalah 8,3 %, 7,6%, 8%, dan 5 %. Jika melihat data sensus terakhir mengenai kependudukan di Indonesia, maka secara teoritis 1 polwan di tanah air ini harus melayani sekitar 11.000 orang perempuan.

Pada tahun 1975, *Economic and Social Council (Ecosoc)* mencanangkan Dekade Perempuan (*Women*

Decade 1975 - 1985) dan menetapkan target partisipasi perempuan di segala sektor pembangunan haruslah mencapai minimal 30%. Target ini ditegaskan kembali pada saat konferensi PBB tentang Perempuan, Perda-maian dan Pembangunan di Beijing pada tahun 1995. Khusus mengenai partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, Komisi PBB untuk Status Perempuan mencanangkan prinsip *gender balance* bahwa partisipasi dan representasi perempuan dalam pengambilan keputusan harus mencapai 50 %. Apabila pencapaian prinsip *gender balance* dijadikan sebagai rujukan, maka dapat dikatakan bahwa partisipasi dan representasi polwan dalam organisasi masih sangat kurang. Hal tersebut bisa disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor dalam diri polwan itu sendiri yaitu kurangnya kesadaran terhadap potensi diri yang dimiliki, merasa cukup puas dengan hanya menjadi orang nomor dua (*to be number two personality tendency*), ataupun adanya rasa takut untuk sukses (*fear of success*) ketika ditawarkan untuk menduduki jabatan tertentu atau bertugas di bidang operasional kepolisian. Faktor eksternal yang berbentuk kurangnya kepercayaan pimpinan untuk memberikan kesempatan dalam melaksanakan tugas tertentu yang diakibatkan adanya stigma bahwa polwan tidak mungkin mampu menyelesaikan masalah-masalah yang bersifat "keras" di lapangan².

Padahal kalau kita merujuk pada sejarahnya, pem

bentukan polwan bukan merupakan komoditas politik melainkan adanya kebutuhan terhadap keberadaan polwan itu sendiri. Penanganan dan penyidikan terhadap kasus kejahatan yang melibatkan kaum perempuan baik korban maupun pelaku kejahatan menjadi latar belakang/ alasan dibentuknya polwan. Polwan di Indonesia lahir pada tahun 1948, berawal dari kota Bukit Tinggi Sumatera Barat tak kala pemerintah Indonesia menghadapi pengungsian besar-besaran dari semenanjung Malaya yang sebagian besar kaum wanita. Mereka tidak mau diperiksa apalagi digeledah secara phisik oleh polisi laki-laki³

Sesungguhnya perempuan adalah insan yang tangguh, yang memiliki kesamaan potensi dengan kaum laki-laki. Bahkan perempuan memiliki kelebihan dengan sifat keperempuanannya, yaitu cenderung lebih jujur, tabah, disiplin, teliti, sabar dan keibuan. Karakteristik khusus tersebut seringkali sangat bermanfaat dalam menyempurnakan jiwa kepemimpinan yang dimiliki. Itulah sebabnya dunia telah memberikan kepercayaan kepada perempuan-perempuan luar biasa untuk memimpin negara sebagai presiden ataupun perdana menteri, maupun jabatan-jabatan eksekutif lainnya dan kedudukan strategis di lembaga legislatif dan yudikatif. Kita pasti tak akan lupa pada kehebatan Margaret Tacher yang memimpin Inggris sebagai perdana menteri yang kukuh sehingga dijuluki *iron woman*, presiden Filipina Corazon Aquino dan Gloria Macapagal Arroyo, perdana menteri India Indira Gandhi, menteri luar negeri Amerika Condoleezza Rice bahkan Indonesia telah mempercayakan Megawati Soekarnoputri memimpin bangsa ini sebagai presiden yang ke lima. Dalam organisasi Polri, walaupun beberapa jabatan kapolsek dan kapolres serta salah satu direktur reserse kriminal telah diberikan kepada polwan, namun apabila dibandingkan dengan peluang dan kepercayaan untuk memimpin yang diberikan kepada polisi laki-laki, peluang bagi polwan masih sangat kecil.

Setelah 3 (tiga) jenderal polwan di masa lalu (yaitu Brigadir Jenderal Dra. Jeanne Mandagie, Brigadir Jenderal Dra. Rukmini dan Brigadir Jenderal Paula), hingga saat ini belum ada satupun polwan berpangkat jenderal meskipun sudah terdapat 6 (enam) komisariss besar polwan yang telah menempuh pendidikan penjenjangan sampai tingkat Sespati (Sekolah Staf dan Administrasi Tingkat Tinggi) Polri dan Lembaga Administrasi Negara (LAN). Selain itu, belum ada polwan yang dipercaya menduduki jabatan kapolda (kepala kepolisian daerah). Padahal, dengan potensi yang dimiliki dan mengacu kepada besarnya kepercayaan yang diberikan dunia kepada perempuan untuk memimpin, tidak tertutup kemungkinan pada suatu hari pimpinan tertinggi Polri akan dijabat oleh seorang polwan.

Atas dasar hal-hal tersebut di atas maka penelitian ini dilakukan, yang pada hakekatnya ingin mengetahui secara pasti, mengapa sampai dengan sekarang peran

dan eksistensi polwan di lapangan masih sedikit, padahal salah satu program jangka pendek (2005 - 2010) Trust Building, Grand strategi Polri Tahun 2005 - 2025 merekomendasikan untuk mengoptimalkan peran polwan dalam menjalankan tugas di lapangan yang mengedepankan persuasif dan dialogis.

Tulisan ini merupakan bagian dari Kajian tentang Kualitas Pemberdayaan Polwan yang dilaksanakan pada tahun 2006 dan ingin menggambarkan tentang potensi yang dimiliki polwan dan eksistensinya dalam pelaksanaan tugas Polri. Penelitian ini dilakukan dengan metode *explanatory studies* dan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, karena disamping mempergunakan kuesioner, juga dilakukan wawancara dan *focus group discussion* (FGD) terhadap responden dan narasumber antara lain kapolda, kapolres, kapolsek, kasat, direktur operasional dan pembinaan, kanit dan masyarakat umum. Penelitian dilakukan di 16 (enam belas) polda di Indonesia, yaitu Nangroe Aceh Darusalam (NAD), Sumatera Utara (Sumut), Kepulauan Riau (Kepri) Jawa Barat (Jabar), Jawa Timur (Jatim), Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan Barat (Kalbar), Kalimantan Timur (Kaltim), Sulawesi Selatan (Sulsel), Sulawesi Utara (Sulut), Sulawesi Tengah (Sulteng), Maluku, dan Papua, pada bulan Juni hingga Oktober 2006.

2. Polwan dan Pelaksanaan Tugas Polri

a. Potensi dan Eksistensi Polwan

Polwan merupakan bagian integral Polri yang sesungguhnya tidak memiliki perbedaan peran, kedudukan maupun penugasan. Namun sejalan dengan perjalanan waktu, telah terjadi perubahan peran polwan, dengan diintegrasikannya organisasi Polri ke dalam tubuh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) pada tahun 1966.

Polwan yang semula bertugas di bidang operasional kepolisian, direkrut dan dididik bersama Kowabri (Korps Wanita ABRI) melalui jalur Sepawamil (Sekolah Perwira Wajib Militer) dari para lulusan perguruan tinggi untuk ditugaskan menjadi perwira staf.

Jalur pendidikan polwan memang kerap kali berubah dan mengalami penyesuaian. Setelah merekrut polwan pertama di tahun 1948, baru pada tahun 1961 direkrut calon perwira polwan untuk mengikuti pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK). Sebanyak 5 (lima) orang calon polwan bersama-sama dengan calon polisi laki-laki mengikuti pendidikan PTIK angkatan IX dan 10 (sepuluh) orang mahasiswi bergabung pada pendidikan PTIK angkatan X. Perekrutan polwan di PTIK hanya berlangsung dua angkatan. Selanjutnya, dengan diintegrasikannya Polri ke dalam tubuh ABRI, maka pada tahun 1965 pendidikan calon perwira polwan diintegrasikan bersama calon polisi laki-laki, dididik di AAK (Akademi Angkatan Kepolisian) di Yogyakarta. Namun perekrutan tersebut hanya

terselenggara satu kali, selanjutnya tidak ada lagi pendidikan polwan di Akademi Kepolisian (AKPOL). Hingga pada tahun 2002, setelah adanya reformasi kepolisian, terdapat 31 calon perwira polwan dididik di AKPOL dan saat ini telah lulus sebanyak dua angkatan pada tahun 2005 dan 2006 serta ditempatkan tersebar di seluruh polda. Kondisi ini cukup menebarkan harapan bagi peningkatan eksistensi polwan. Dimasa yang akan datang akan lahir pemimpin-pemimpin Polri dari kalangan polwan, namun hal itu baru tercapai sekira 20 (dua puluh) tahun mendatang, sementara kebutuhan atas eksistensi polwan sudah cukup mendesak.

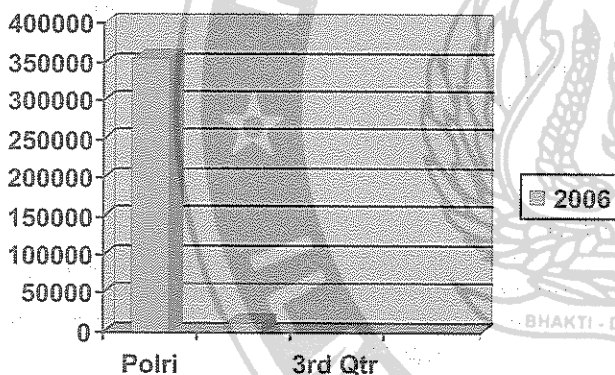
Potensi dan eksistensi polwan yang ada saat ini dapat dilihat melalui tabel-tabel data berikut ini:

1) Kuantitas Polwan.

Dari jumlah keseluruhan anggota Polri saat ini, yaitu 354.917 orang, jumlah polwan hanya sebesar 11.411 orang. Perbandingan antara jumlah polwan dan seluruh anggota Polri dapat dilihat melalui grafik berikut ini:

Grafik 1:

Perbandingan antara Jumlah Polwan dengan Anggota Polri



2) Kepangkatan

Kepangkatan tertinggi yang dicapai polwan saat ini baru mencapai pangkat komisaris besar polisi dengan distribusi kepangkatan mulai pangkat bintara, pama dan pamen polwan sebagai berikut:

Tabel 1

Distribusi Polwan Berdasarkan Kepangkatan

PATI	PAMEN	PAMA	BINTARA
0	781	2040	8590

3) Latar Belakang Pendidikan

Sejak pendidikan pembentukan seperti Sekolah Bintara (Seba), Sekolah Pembentukan Perwira (Setukpa), Akpol, Pendidikan Perwira Sumber Sarjana (PPSS), cukup banyak polwan yang telah mengikuti pendidikan

pengembangan seperti Sekolah Lanjutan Perwira (Selapa), Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Sekolah Staf dan Pimpinan (Sespim), hingga Sespati, namun belum ada yang mengikuti pendidikan Lemhanas.

Tabel 2

Data Latar Belakang Pendidikan Polwan sampai dengan Tahun 2006

NO	THN	JENIS PENDIDIKAN									
		L E M H A N A S	SES PATI/ SES PATI LAN	SES PIM/ SES PA ME N	P T I K	S E L A P A	S E T U K P A	P P S S	A K P O L	S E B A	K E T
1	S/D 2000	-	1	1	13	92	300	401	-	2862	
2	2001	-	-	2	-	23	150	28	-	372	
3	2002	-	-	2	-	26	130	29	-	449	
4	2003	-	1	2	-	23	145	6	31	745	
5	2004	-	2	2	7	15	98	15	28	71	
6	2005	-	-	10	13	26	84	2	30	981	
7	2006	-	2	6	14	31	-	1	40	500	
JUMLAH		0	6	25	47	236	1010	482	129	6700	

4) Penugasan Polwan sebagai Kasatwil/Kasat

Sejak tahun 2002 polwan telah dipercaya memangku jabatan kepala kesatuan wilayah sebagai kapolres dan wakapolres, namun untuk jabatan kapolsek sudah lebih dulu diberikan beberapa tahun sebelumnya. Adapun jumlah polwan yang telah dipercaya memimpin di bidang operasional hingga saat ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3

Data Polwan Berdasarkan Jabatan sebagai Kasatwil / Kasat sampai dengan Tahun 2006

JABATAN	JUMLAH	KETERANGAN
Kapolres	6 orang	Metro Jaya, Jabar, Jateng, Jatim, Sumbar
Wakapolres	10 orang	Metro Jaya, Jabar, Jateng, Jatim
Kapolsek	46 orang	
Wakapolsek	18 orang	
Kasat/Waka	25 orang	

Sumber: Sub Bagian Polwan Biro Binkar Polri.

b. Pelaksanaan Tugas Polri

Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI., Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 butir 1.) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai alat negara dan bagian dari *criminal justice system* (aparatur penegak hukum), mempunyai tugas pokok sebagaimana diatur dalam UU

No. 2 Tahun 2002 pasal 13, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.

Dalam menjalankan tugas pokoknya Polri bertugas melaksanakan kegiatan operasional kepolisian sebagaimana diatur dalam pasal 14 UU No. 2 Tahun 2002, yang beberapa diantaranya akan lebih efektif dilaksanakan oleh polwan antara lain melakukan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli, menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan, membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dan kesadaran hukum masyarakat, masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan, melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana utamanya yang melibatkan perempuan dan anak-anak sebagai tersangka maupun korban, dan memberikan pelayanan masyarakat.

Selain melaksanakan tugas pokoknya, Polri juga menjalankan fungsinya sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan kamtibmas, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. (UU No. 2 Tahun 2002, Pasal 2) dan merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara kamtibmas, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. (UU No. 2 Tahun 2002, Pasal 5)

3. Hasil dan Analisa

Hasil penelitian yang diperoleh merupakan pandangan responden tentang potensi polwan yang terdiri dari indikator perilaku, disiplin dan kinerja, serta pendapat mengenai eksistensi polwan yang terdiri dari penugasan di bidang operasional kepolisian dan peningkatan kuantitas polwan, maka secara umum data yang didapatkan adalah sebagai berikut:

- a. Potensi Polwan dan Eksistensi Polwan Berdasarkan Pandangan Masyarakat:
 - 1) Pandangan Masyarakat tentang Perilaku, Disiplin dan Kinerja Polwan
Kepada responden masyarakat umum sebagai pi-

hak yang berhak untuk dilindungi, diayomi dan dilayani Polri ditanyakan tentang perilaku, disiplin dan kinerja polwan, dan diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4
Pandangan Masyarakat tentang Perilaku, Disiplin dan Kinerja Polwan

NO	POLDA	PERILAKU(%)			DISIPLIN(%)			KINERJA(%)		
		B	KB	TB	B	KB	TB	B	KB	TB
1	NAD	85	12	3	99	1	0	77	17	6
2	SUMUT	71	21	8	95	4	1	63	24	13
3	KEPRI	74	18	8	78	22	0	64	23	13
4	JABAR	77	17	6	93	7	0	64	20	16
5	JATENG	72	20	8	96	4	0	65	24	11
6	JATIM	73	21	6	96	4	0	64	22	14
7	BALI	74	17	9	96	4	0	64	19	17
8	NTB	70	24	6	96	6	0	58	6	14
9	NTT	70	22	8	72	13	15	52	13	15
10	KALBAR	74	18	8	80	19	1	63	20	17
11	KALTIM	72	19	9	95	2	3	63	20	17
12	SULSEL	80	19	1	94	6	0	89	7	4
13	SULUT	73	19	8	91	8	2	65	21	14
14	SULTENG	72	20	8	97	3	0	65	17	18
15	MALUKU	97	3	0	97	3	0	65	21	14
16	PAPUA	72	21	7	95	3	2	57	22	13
Rata-rata:		75	18	7	92	6	2	65	18	17

Keterangan:

- B : BAIK
KB : KURANG BAIK
TB : TIDAK BAIK

Kriteria:

- a. Perilaku Baik: tegas, tidak ragu-ragu, peduli, tidak arogan, jujur, tidak KKN, masyarakat tidak takut berhadapan dengan polwan, dan cenderung memilih untuk dilayani polwan.
 - b. Disiplin Baik: Tertib, tepat waktu, melaksanakan perintah, patuh pada aturan.
 - c. Kinerja Baik: Kehadiran polwan menyelesaikan masalah, tidak mempersulit.
- 2) Pandangan Masyarakat tentang Penugasan Polwan di Bidang Operasional dan Peningkatan Kuantitas Polwan.

Terhadap responden masyarakat ditanyakan pendapatnya apabila polwan diberi penugasan di bidang operasional dan kuantitas polwan ditingkatkan, berdasarkan apa yang dirasakan dan dialami pada saat memperoleh pelayanan kepolisian dari polwan maupun pandangan masyarakat mengenai penampilan polwan di lapangan maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 5

Pandangan Masyarakat tentang Penugasan Polwan di Bidang Tugas Operasional dan Peningkatan

NO	POLDA	PENUGASAN OPERASIONAL(%)			PENINGKATAN KUANTITAS(%)		
		SETUJU (%)	KURANG SETUJU (%)	TIDAK SETUJU (%)	SETUJU (%)	KURANG SETUJU (%)	TIDAK SETUJU (%)
1	NAD	64	20	6	76	22	2
2	SUMUT	92	5	3	82	17	1
3	KEPRI	53	28	19	79	11	10
4	JABAR	57	21	22	81	13	6
5	JATENG	54	26	20	72	23	5
6	JATIM	58	23	19	76	21	3
7	BALI	62	23	18	83	14	3
8	NTB	92	5	3	78	21	1
9	NTT	50	19	31	69	23	8
10	KALBAR	61	21	18	86	13	1
11	KALTIM	55	28	17	90	8	2
12	SULSEL	78	18	4	82	23	5
13	SULUT	58	21	21	73	15	12
14	SULTENG	54	24	22	76	23	11
15	MALUKU	55	23	22	67	23	10
16	PAPUA	55	36	9	90	10	0
Rata-rata		62	22	16	78	17	5

Kuantitas Polwan.

Pandangan Pimpinan Kepolisian tentang Potensi dan Eksistensi Polwan

1) Pandangan Pimpinan Kepolisian tentang Potensi Polwan

Pertanyaan diajukan kepada kapolda, kapolres dan kapolsek, kasat serta direktur operasional dan pembinaan di tingkat polda dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 6

Pandangan Pimpinan Kepolisian tentang Perilaku Disiplin dan Kinerja Polwan

NO	POLDA	PERILAKU(%)			DISIPLIN(%)			KINERJA(%)		
		B	KB	TB	B	KB	TB	B	KB	TB
1	NAD	76	17	7	86	14	0	90	7	3
2	SUMUT	55	36	9	80	15	5	82	9	9
3	KEPRI	60	33	7	82	18	0	85	11	4
4	JABAR	66	21	13	88	11	1	99	1	0
5	JATENG	78	18	4	93	7	0	92	7	1
6	JATIM	78	13	12	87	7	6	85	10	5
7	BALI	61	28	11	94	6	0	88	12	0
8	NTB	67	20	13	81	13	6	84	13	3
9	NTT	50	25	25	73	18	9	81	19	0
10	KALBAR	76	16	8	90	6	4	87	11	2
11	KALTIM	62	15	23	83	17	0	87	7	6
12	SULSEL	67	33	0	81	13	6	78	20	2
13	SULUT	74	16	10	76	24	0	79	8	13
14	SULTENG	76	16	8	84	11	5	77	14	9
15	MALUKU	50	30	20	60	40	0	88	8	4
16	PAPUA	65	15	20	75	25	0	95	5	0
Rata-rata:		66	22	12	82	15	3	86	10	4

Keterangan:

- Perilaku Baik: tegas, tidak ragu-ragu, peduli, tidak arogan, tidak KKN, masyarakat tidak takut berhadapan dengan polwan, dan cenderung memilih untuk dilayani polwan.
- Disiplin Baik: Tertib, tepat waktu, melaksanakan perintah, patuh pada aturan.

- Kinerja Baik: dapat diandalkan dan dapat diberdayakan secara optimal, mampu menyelesaikan tugas yang diberikan dengan baik.

2) Pandangan Pimpinan Kepolisian tentang Kebijakan Menugaskan Polwan di Bidang Operasional dan Peningkatan Kuantitas Polwan

Kepada responden kapolda, kapolres dan kapolsek ditanyakan mengenai kebijakan untuk menempatkan polwan dalam tugas-tugas operasional maupun jabatan strategis, tidak membedakan dengan polisi laki-laki, dan meningkatkan kuantitas polwan, diperoleh jawaban sebagai berikut:

Tabel 7

Pandangan Pimpinan Kepolisian tentang Kebijakan Menugaskan Polwan di Bidang Operasional dan Peningkatan Kuantitas Polwan

NO	POLDA	PENUGASAN OPERASIONAL			PENINGKATAN KUANTITAS		
		SETUJU (%)	KURANG SETUJU (%)	TIDAK SETUJU (%)	SETUJU (%)	KURANG SETUJU (%)	TIDAK SETUJU (%)
1	NAD	89	11	0	92	5	3
2	SUMUT	79	13	8	92	5	3
3	KEPRI	80	18	2	85	14	1
4	JABAR	79	18	3	87	9	4
5	JATENG	81	14	5	85	12	3
6	JATIM	85	12	3	92	6	2
7	BALI	78	17	5	82	10	8
8	NTB	88	11	2	88	9	3
9	NTT	89	8	13	82	15	3
10	KALBAR	83	14	3	93	4	3
11	KALTIM	80	18	2	85	13	2
12	SULSEL	87	11	2	87	10	3
13	SULUT	77	17	6	91	9	0
14	SULTENG	80	15	5	89	9	2
15	MALUKU	87	13	0	89	11	0
16	PAPUA	85	13	2	87	9	4
Rata-rata		83	14	3	88	9	3

- Melalui kegiatan FGD selain diperoleh informasi mengenai perilaku polwan, disiplin dan kinerjanya, didapatkan pula pedapat mengenai kebijakan pimpinan dan peningkatan kuantitas polwan sebagai berikut:

Pada umumnya responden dan narasumber menyatakan perilaku, disiplin dan kinerja polwan baik, namun masih terdapat sebagian kecilnya yang memiliki sifat pemarah, kurang tegas, kurang bergaul dengan masyarakat dan kurang simpatik.

Penilaian sebagian besar responden/narasumber terhadap disiplin polwan baik, tetapi terdapat sebagian kecil yang menyatakan kurang atau tidak baik, karena masih terdapat polwan yang sering membolos, terlambat datang bahkan ada yang hingga berbulan-bulan tidak melaksanakan tugas.

Pada daerah tertentu, seperti Papua, kurang terlihat kiprah polwan di lapangan, sehingga masyarakat jarang berjumpa dan berinteraksi dengan polwan. Selain

itu, ada pendapat yang mengatakan bahwa kinerja polwan menurun setelah berumah tangga.

Pimpinan kepolisian di daerah mendukung kebijakan menempatkan polwan dalam tugas operasional, namun perlu mempertimbangkan karakteristik wilayah masing-masing, karena pada wilayah-wilayah tertentu tingkat kerawanan baik secara geografis maupun demografis cukup rawan bagi keberadaan polwan di bidang operasional, utamanya wilayah yang memiliki kekhususan etnis seperti Papua dan Maluku.

Penugasan polwan sebaiknya tidak dibedakan dengan polisi laki-laki, dan mempertimbangkan situasi saat ini yang telah banyak mempercayakan perempuan menduduki jabatan musyawarah pimpinan daerah (muspida) yaitu, bupati, kepala pengadilan dan kepala kejaksaan, dan musyawarah pimpinan kecamatan (muspika) sudah saatnya Polri lebih membuka peluang kepada polwan untuk menduduki jabatan kapotres maupun kapolsek bahkan mungkin kapolda karena dalam jajaran pemerintah daerah sudah ada gubernur perempuan.

Sebagian besar responden/ narasumber setuju untuk meningkatkan kuantitas polwan hingga 10% dari jumlah keseluruhan anggota Polri, karena hingga saat ini jumlah polwan dirasakan masih kurang, sehingga belum dapat mengisi jabatan-jabatan tertentu yang bisa lebih optimal bila dijabat oleh polwan.

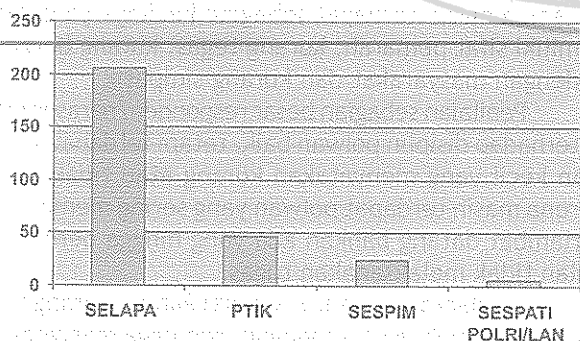
d. Dari informasi yang telah berhasil diperoleh, dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

1) Potensi Polwan

Polwan dinilai memiliki potensi yang baik. Hingga tahun 2006, polwan berpangkat pamen sudah mencapai 781 orang. Cukup banyak pula yang telah mengikuti pendidikan pengembangan yang menjadi salah satu persyaratan untuk menduduki jabatan tertentu. Dalam kesehariannya polwan berperilaku baik, berdisiplin tinggi dan memiliki kinerja yang baik. Aspek disiplin memperoleh penilaian yang sangat positif. Hal tersebut dapat dilihat dari grafik berikut ini:

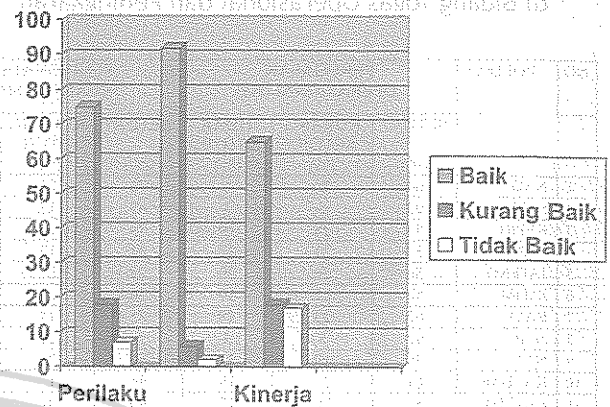
Grafik 2

Latar Belakang Pendidikan Pengembangan Polwan Hingga Tahun 2006



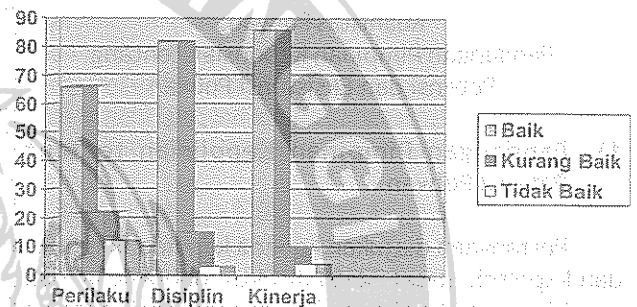
Grafik 3

Pandangan Masyarakat tentang Potensi Polwan



Grafik 4

Pandangan Pimpinan Kepolisian tentang Potensi Polwan



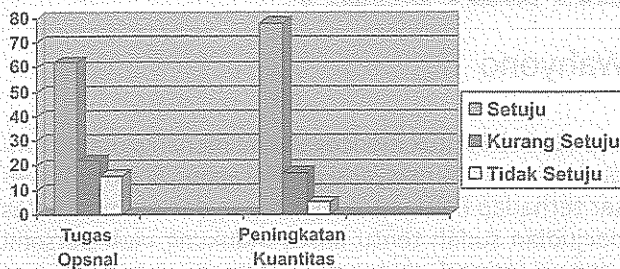
2) Eksistensi Polwan

Masyarakat mendukung penugasan polwan di bidang operasional, karena disadari bahwa kebutuhan terhadap keberadaan polwan cukup tinggi mengingat banyaknya kasus-kasus yang melibatkan perempuan dan anak sebagai tersangka atau korban kejahatan, yang membutuhkan sifat-sifat khusus yang dimiliki polwan sebagai seorang perempuan. Selain itu, banyak tugas operasional kepolisian lainnya yang dinilai lebih efektif bila ditangani oleh polwan mengingat potensi yang dimilikinya.

Kepercayaan yang telah cukup banyak diberikan kepada kaum perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif dan lembaga yudikatif lainnya, cukup menjadi suatu dorongan bagi masyarakat untuk mendukung penugasan polwan sebagai kasatwil.

Pimpinan kepolisian di daerahpun menyadari adanya kebutuhan polwan dalam tugas operasional kepolisian, dengan mempertimbangkan potensi polwan yang baik dan kebutuhan di lapangan, dan kurangnya kuantitas polwan untuk ditempatkan dalam tugas/jabatan operasional. Hal tersebut di atas dapat dilihat melalui grafik berikut ini:

Grafik 5
 Pandangan Masyarakat tentang Penugasan
 di Operasional dan Peningkatan Kuantitas Polwan



Grafik 6
 Pandangan Pimpinan Kepolisian tentang Penugasan
 di Operasional dan Peningkatan Kuantitas Polwan

4. Kesimpulan

Polwan memiliki potensi yang baik. Karena sifat-sifatnya yang cenderung lebih jujur, tegas, peduli/ berempati tinggi terhadap kesulitan masyarakat, dan tidak KKN, masyarakat tidak takut berhadapan dengan polwan dan cenderung lebih memilih untuk dilayani oleh polwan apabila membutuhkan bantuan kepolisian. Selain perilaku yang baik, polwan memiliki disiplin yang tinggi, tertib, tepat waktu, patuh pada perintah atasan dan aturan yang berlaku, serta memiliki kinerja yang baik pula, karena kehadiran polwan dinilai dapat menyelesaikan masalah, tidak mempersulit, dapat diandalkan dan dapat diberdayakan secara optimal serta mampu menyelesaikan tugas yang diberikan dengan baik.

Eksistensi polwan dalam pelaksanaan tugas Polri masih rendah. Walaupun polwan memiliki potensi yang baik, dan pimpinan kepolisian di daerah mendukung kebijakan untuk memberi peluang kepada polwan sama luasnya dengan polisi laki-laki untuk bertugas operasional dan menjadi pengambil keputusan, namun hingga tahun 2006 Polri baru memberikan kepercayaan dan

peluang kepada 6 (enam) polwan untuk menjabat kapolres, (meskipun sudah terdapat 25 (dua puluh lima) polwan yang mengikuti pendidikan sespim), dan belum ada lagi brigadir jenderal polwan saat ini, meskipun sudah terdapat 6 (enam) polwan lulusan Sespati Polri/LAN

Untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan meningkatkan kehadiran polwan di tengah-tengah masyarakat, kuantitas polwan dapat ditingkatkan setidaknya hingga 10 % dari jumlah keseluruhan anggota Polri.

Penugasan dalam bidang operasional kepolisian sangat dibutuhkan untuk meningkatkan eksistensi polwan dalam pelaksanaan tugas Polri. Agar polwan segera kembali kepada jati dirinya dengan merujuk kepada sejarah pembentukan polwan dan mencapai program jangka pendek grand strategi Polri, lulusan sekolah pembentukan polwan (Seba, Setukpa, Akpol) langsung ditempatkan dalam tugas operasional agar segera dapat menerapkan ilmu yang diperoleh dan menggali pengalaman sebanyak-banyaknya sehingga di masa depan polwan semakin siap menjadi bagian integral Polri yang eksis dan menjadi salah satu kunci bagi perbaikan citra Polri.

Mempertimbangkan bahwa tidak ada perbedaan hakiki dalam kedudukan antara polwan dan polisi laki-laki di organisasi Polri, peluang polwan untuk mengemban tugas operasional dan sebagai kasatwil perlu dibuka luas. Penempatan polwan dalam jabatan kasatwil bagi polwan yang telah memenuhi syarat pendidikan akan menjadi ujian bagi polwan untuk menunjukkan potensinya. Polwan yang kurang berpotensi akan tersisihkan berdasarkan seleksi alam melalui penilaian obyektif pimpinan. Dengan demikian, bukan hanya sampai jabatan kapolres, jabatan kapolda bahkan mungkin kapolri dapat diraih sepanjang polwan mampu menunjukkan potensi dan eksistensinya dalam pelaksanaan tugas Polri.**

AKBP Dra Ratnawati (Peneliti Biro Litbang Polri)

Info

EH, TAHU ENGGAK



Menurut para ahli sentuhan dan pelukan itu sangat penting. Sentuhan bisa memicu otak buat melepaskan hormon Endorphin yang punya efek lebih kuat dari morfin dan heroin. Sementara pelukan sangat penting untuk pertumbuhan seorang anak. Banyak penelitian yang menemukan bahwa seorang anak yang jarang dipeluk akan lebih agresif dan suka menyerang orang lain jika dibandingkan dengan anak yang lebih sering mendapatkan pelukan. Enggak salah dong kalau kita sering menyentuh dan memeluk orang yang kita sayangi....?